

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa terhadap permasalahan tentang sekolah mengemudi yang diharapkan dapat mengendalikan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dan dapat menekan jumlah korban akibat kecelakaan di jalan.

Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya sekolah-sekolah mengemudi sebagai lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah dan telah mendapatkan akreditasi dalam hal melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi bagi para calon pengemudi yang akan mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Meskipun dalam kenyataannya para Instruktur pelatih yang memberikan transfer ilmu dan keahlian dalam mengemudikan kendaraan masih terbelang jauh dari harapan, dikarenakan dalam perekrutan instruktur pada sekolah – sekolah mengemudi tidak berpegang pada sertifikat yang dimiliki oleh para instruktur namun lebih kepada faktor pengalaman dalam mengendarai kendaraan bermotor saja. Sehingga berdampak pada hasil didikan yang telah diciptakan masih belum maksimal, para peserta sekolah mengemudi hanya mampu mengendarai kendaraan saja tanpa mengerti etika dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga apa yang diharapkan pada sekolah mengemudi yang dapat menekan jumlah kecelakaan tidak dapat di penuhi.

2. Bahwa sampai saat ini tidak ada standar kompetensi yang baku yang di berikan oleh pemerintah kepada sekolah – sekolah mengemudi sebagai standar dalam mengeluarkan hasil didikan yang berkualitas. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pada pasala 78 ayat (1) “Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi diselenggrakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari pemerintah”. Namun kenyataannya para bagaimana dapat menciptakan hsil didikan yang berkualitas dengan memiliki skill dan etika pengemudi yang baik jika, para instruktur yang membidangi pendidikan dan pelatihan tersebut berasal bukan dari hasil pendidikan melainkan hanya berasal dari pengalaman yang di dapat secara otodidak.
3. Bahwa untuk menekan jumlah kasus laka lantas harus di mulai dengan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang betul dan sesuai dengan kebutuhan pengemudi yaitu etika dan tata cara berlalu lintas tanpa mengurangi keterampilan dalam berkendara. Jika dalam pendidikan dan pelatihan mengemudi telah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang handal maka bukan tidak mungkin angka kecelekaan yang selama ini selalu menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dapat di tekan serendah-rendahnya.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, penulis inginn menyampaikan beberapa pemikiran sebagai saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para

pengelola sekolah mengemudi dan juga semoga dapat bermanfaat dalam usaha pemerintah untuk mengurangi jumlah kasus kecelakaan lalu lintas selama ini.

1. Bagi para pengelola sekolah mengemudi hendaklah mempunyai standar yang baik dalam melakukan pendidikan dan pelatihan mengemudi bagi para calon peserta pengemudi, jumlah jam pelatihan dapat di perbanyak dan berikan pula pesan-pesan yang berisikan etika dan tata cara yang baik di jalan. Berikan cara-cara yang baik dengan mengutamakan pada penguasaan teknis dan mental pengemudi atau lebih dikenal dengan defensive driving.
2. Kepada Pemerintah dalam hal ini Polri dan Dinas Perhubungan hendaknya memberikan penyuluhan dan kampanye keselamatan pengemudi secara berkelanjutan demi memberikan kedisiplinan bagi para pengemudi yang menjalankan kendaraan bermotor di jalan, aspek-aspek keselamatan yang sering kali di abaikan harus selalu di ingatkan kembali dengan semakin rutin dan berkesinambungan menggalakan kesadaran dalam berlalu lintas. Pemerintah yang telah memberikan akreditasi bagi sekolah mengemudi hendaknya mampu mengevaluasi dan memberikan pelatihan kepada instruktur pada sekolah-sekolah mengemudi agar kualitas yang di ciptakan sesuai dengan skill yang ada pada instruktur.
3. Kepada aparat atau personil kepolisian lalu lintas yang melakukan tugas dan wewenang dalam rangka Pengendalian jumlah kasus laka lintas jangan melakukan dengan cara-cara bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-undang

khususnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

